

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN MUARA ENIM**

Oleh:

Lis Nur Intan¹, *Rita Junita²

Email: junitarita@ymail.com

¹ FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

² FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim. Dalam Pelaksanaannya Peran Dinas Koperasi Dan UKM sudah sangat baik, dalam melakukan pembinaan dan pengembangan di dunia usaha kecil menengah berupa kerajinan tangan, dan juga penyedia akses atau fasilitator ke pihak-pihak lain sebagai pendukung sektor ini. Namun memang di tingkat Kabupaten akses modal memang terbatas karena memang tidak banyak sektor swasta yang bisa dilibatkan kecuali dunia perbankan. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya program pemerintah berupa gerbang serasan yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan modal dari perbankan dengan pemerintah sebagai jaminannya. Namun sisi lain memang akses modal dari pihak swasta non perbankan memang sangat terbatas.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

The role of regional governments in the era of regional autonomy is very large, where regional governments are given the broadest authority to manage their own government, including regional economic development based on the potential wealth of the region. To carry out this task, the government must play an active role in regional economic development, there are many obstacles faced by local governments in their economic development, namely inequality in the development of the industrial sector, uneven investment, low level of mobility of production factors, differences in natural resources, demographic and economic differences. lack of smooth inter-regional trade. These problems have an impact on regional economic development, but these problems can also be overcome by strategies carried out by local governments, or carrying out strategies proposed by experts including according to Arsyad (2000) physical development strategies, development strategies business world, business development strategies, community development strategies, these strategies are at least helpful or one of the references for local governments in overcoming existing problems in their regional economic problems so that economic development can run well, increase economic growth and per capita income. society also increases.

Keywords: Local Government, Cooperatives, Small and Medium Enterprises.

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Tamansiswa Palembang.

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Tamansiswa Palembang.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi.³ Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM).⁴ UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat.⁵

Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya.⁶ Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan masalah ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi. Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka tersirat suatu harapan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran. Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar.⁷ Namun seiring dengan berkembangnya industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia, maka sektor manufaktur ini mengalami peningkatan

³. Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.13.

⁴. Didi Djadjuli, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, hlm.8.

⁵. *Ibid*, hlm.9.

⁶. Ismail Namawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putramedia Nusantara, 2009), hlm.107.

⁷. Hendrojogi, *Koperasi, Asas, Teori, dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.21.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

sehingga mulai menggeser sektor pertanian. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan.⁸

Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka tersirat suatu harapan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan.⁹ Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran. Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar. Namun seiring dengan berkembangnya industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia, maka sektor manufaktur ini mengalami peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian.¹⁰

Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini

bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Namun misi ini sempat belum terlaksana seiring dengan sikap pemerintah yang masih mengandalkan usaha besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi.¹¹

Adanya ketakutan dari pemerintah tentang pertumbuhan yang rendah sehingga mereka kembali dengan kebijakan ekonomi konglomerasi mengingat tekanan dari dunia internasional agar Indonesia mengejar pertumbuhan daripada pemerataan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UKM relatif lebih mudah dikembangkan. UKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk sama-sama membangun ekonomi daerah. UKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.¹²

⁸ . Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.34.

⁹ . Hendrojogi, *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁰ . Harsoyo.dkk., *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Tangerang, Agromedia Pustaka, 2006), hlm.158.

¹¹ . Medriyansah, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 2017, hlm 3.

¹² . Feni Dwi Anggraeni, *"Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha" Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing*



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UKM di Kota Muara Enim ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Muara Enim, permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UKM.

Untuk mengharapakan generasi muda, mampu meningkatkan usaha kecil menengah, maka salah satu dari pada dinas koperasi dan UKM, membantu generasi muda dalam mengembangkan usaha kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, atas dasar itulah perlu dikaji lebih dalam mengenai peran dinas koperasi dan UKM Kabupaten muara enim, maka dalam penelitian ini berjudul **“Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara**

Enim”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim?

C. PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Sedangkan Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Dari kelemahan yang dimiliki UKM, maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antarintansi.

Menurut Kasi mengatakan bahwa:

"Sebenarnya peran penting dari UKM ini adalah melakukan pembinaan di sektor usaha dan UKM, masyarakat menengah kebawah ini terkadang punya ide namun sulit untuk di

aplikasikan, kemudian memang ada modal dan ada lahan tapi ngga' punya ide, nah disinilah peran dari Dinas Koperasi dan UKM. Memberikan ide dan saran serta mengarahkan mana yang harusnya mereka lakukan" (Wawancara 27 Oktober 2019)

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu pegawai bahwa:

"Sejauh ini memang program-program yang dilakukan oleh dinas Koperasi Dan UKM belum banyak berhasil, hal ini karena memang di daerah sulit untuk melakukan pengembangan, berbeda dengan di Kota, yang masyarakat milenialnya sudah memiliki kreativitas dan banyak ide, disini kami harus lebih dahulu menumbuhkan ruh atau jiwa wirausaha kemudian memberikan pelatihan baru pengembangan, bisa dikatakan masyarakat disini sudah ada pada zona nyaman gitu" (Wawancara 27 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas menekan bahwa adanya kesulitan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim dikarenakan masyarakat muara enim kebanyakan sudah berada di zona nyaman, kreativitas dan kemampuan untuk pengembangan sektor usaha dan ide-idenya masih terbatas. Sehingga sulit bagi Dinas Koperasi Dan UKM untuk melakukan pengembangan.

"Koperasi di Kabupaten muara enim berjumlah 492 Koperasi sementara yang aktif hanya 330 dan yang tidak aktif 152," jelas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muara Enim, Surdin, Senin (6/8)."

Menurutnya, meski saat ini ada 330 Koperasi dalam kondisi aktif, namun tidak semuanya tergolong sehat. Artinya koperasi tidak sehat itu tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal layaknya sebuah lembaga Koperasi. "Untuk itu Dinas Koperasi mempunyai program pembinaan baik itu yang



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

aktif maupun tidak aktif agar semuanya bisa sehat".

Dari hasil pembinaan, koperasi yang tidak aktif ada yang diusulkan untuk dibubarkan karena sudah tidak memungkinkan untuk dibangkitkan. "Yang sudah keluar SK nya untuk pembubaran ada 64 koperasi, dan pembubaran itu dilakukan oleh Kementrian Koperasi. Yang tidak aktif ini, lanjutnya sebagian besar berbentuk KUD simpan pinjam, dan pengurusnya pun bahkan sudah tidak ada lagi. "Setelah di bina dirasa tidak bisa dibangkitkan maka kita verifikasi, kalau tidak ada keterikatan dengan pihak ketiga maka kita usulkan pembubaran ke kementerian koperasi,"

Menurutnya, untuk apa ada koperasi yang tidak aktif, lebih baik membentuk koperasi baru yang punya energi yang baru. "Yang aktif dan sehat itu rata rata koperasi perusahaan atau karyawan. Juga koperasi perkebunan seperti karet dan sawit. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran dan SDM dinas koperasi terus mencoba menggelorakan berdirinya koperasi yang aktif dan sehat. "Saya berharap semua koperasi sehat dan semakin berkembang usahanya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya,"

Dari berita di atas sudah menjadi indikator bahwa program-program Dinas Koperasi dan UKM memang memiliki kendala tersendiri, kebanyakan dari program yang

sudah diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik dan bahkan vacum. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM sejauh ini hanya bisa memberikan modal dan pelatihan saja, namun tidak berkelanjutan kearah bagaimana barang dan hasil karya atau produk bisa langsung diterima di pasaran. Karena terkadang produk hasil UKM ini prosesnya tidak mudah dan sulit bersaing dengan produk luar.

2. Faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim

Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya program Gerbang Serasan. Gerbang Serasan Pola Baru (Yang Disempurnakan), Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak lagi menyimpan dana APBD sebagai Jaminan kredit UMKMK tapi dilakukan dengan:

- Mengoptimalkan skim kredit perbankan yang telah ada;
- Memberikan subsidi suku bunga kredit dan premi asuransi kepada UMKMK;
- Menyediakan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) sebagai pendamping UMKMK dalam kaitan dengan kredit perbankan; dan
- Menyediakan Sekretariat Gerbang Serasan sebagai **home base** atau **rumah bagi UMKMK**.

Berikut ini solusi yang bisa diberikan oleh program Gerbang Serasan adalah:

- GERBANG SERASAN sebagai



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

pemberdayaan UMKMK untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

- b. GERBANG SERASAN mensinergikan antara Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam perkuatan permodalan UMKMK.
- c. GERBANG SERASAN meningkatkan daya saing UMKMK di tingkat nasional dan global.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan program Gerbang Serasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya program pemerintah Kabupaten Muara Enim berupa Gerbang Serasan, yang bisa mempermudah masyarakat untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan dengan pemerintah sebagai jaminannya melalui program Gerbang Serasan.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Akses modal terbatas. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dinas koperasi dan UKM Kabupaten Muaraenim memang memiliki akses modal, khususnya ke pihak swasta, namun untuk mendapatkan modal yang bisa benar-benar mendukung dunia UKM sangat minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016) jumlah UMKMK di Kabupaten Muara Enim mencapai 4.123 unit. Sedangkan Koperasi mencapai 481 unit. Permasalahan utama yang

dihadapi UMKMK di Kabupaten Muara Enim adalah masalah permodalan. Sebagian besar dari mereka belum memiliki akses memadai kepada perbankan. Walaupun sudah ada akses ke perbankan, usaha mikro kecil tidak sanggup mengajukan kredit karena bunga bank komersial relatif tinggi untuk usaha mereka.

Menghadapi masalah yang dihadapi UMKMK ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan terobosan melalui inovasi program GERBANG SERASAN (Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001. Dalam program ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Giro Beku di Bank Pelaksana sebagai Jaminan kredit. Bank Pelaksana mengeluarkan kredit khusus kepada UMKMK dengan bunga murah dan di jamin oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi Dan UKM sudah sangat baik, dalam melakukan pembinaan dan pengembangan di dunia usaha kecil menengah berupa kerajinan tangan, dan juga penyedia akses atau fasilitator ke pihak-pihak lain sebagai pendukung sektor



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

ini. Namun memang di tingkat Kabupaten akses modal memang terbatas karena memang tidak banyak sektor swasta yang bisa dilibatkan kecuali dunia perbankan.

- b. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya program pemerintah berupa gerbang serasan yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan modal dari perbankan dengan pemerintah sebagai jaminannya. Namun sisi lain memang akses modal dari pihak swasta non perbankan memang sangat terbatas.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran peneliti bahwa Dinas Koperasi dan UKM harus melibatkan pihak swasta bukan perbankan untuk ikut andil dalam dunia UKM, sebagai dukungan untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Muara Enim.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Azrul Tanjung. 2017 *Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Didi Djadjuli, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Feni Dwi Anggraeni, 2013, "*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha" Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang*)," Jurnal Administrasi Publik 1, No. 6.
- Harsoyo.dkk., 2006, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Tangerang, Agromedia Pustaka.
- Hendrojogi, 2007, *Koperasi, Asas, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Namawi, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: Putramedia Nusantara.
- Medriyansah, 2017, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi.
- Rio Dan Sulistiawati, 2016, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sartika, Titik dan Rachman, 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bogor; Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tri Siwi Agustina, 2015, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausahaan Dan UMKM DI Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tulus Tambunan, 2009, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Partomo dan Soejoedono, 2004, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.